

## **BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

### **A. Kesimpulan**

Mengacu pada hasil pengolahan data dan penjabaran pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh beberapa simpulan berikut.

1. Indeks Pembangunan Gender berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan, sehingga apabila terjadi kenaikan indeks Pembangunan gender akan menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.
2. Upah Minimum Kabupaten berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sehingga apabila terjadi kenaikan UMK akan menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan, sehingga apabila terjadi kenaikan TPT akan meningkatkan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.
4. Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan, sehingga apabila terjadi peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.
5. Panjang Jalan tidak berpengaruh terhadap variabel Tingkat Kemiskinan, sehingga apabila terjadi peningkatan panjang jalan tidak akan mempengaruhi tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.

### **B. Implikasi**

Merujuk pada kesimpulan di atas, implikasi yang dapat disampaikan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pemerintah daerah perlu mendorong kesetaraan gender melalui pelatihan kerja berbasis kebutuhan lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi perempuan, khususnya di desa. Untuk mendukung partisipasi kerja perempuan, dibutuhkan kebijakan konkret seperti penyediaan tempat penitipan anak, jam kerja fleksibel, dan perlindungan hak pekerja perempuan. Kolaborasi antarinstansi dan pemantauan rutin sangat penting agar program berjalan efektif dan berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan.
2. Pemerintah daerah bersama pelaku usaha perlu menetapkan UMK secara rasional dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan inflasi dan standar hidup layak bagi para pekerja serta produktivitas tenaga kerja. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus memastikan perusahaan dan pelaku usaha untuk patuh terhadap standar UMK dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap para pelaku usaha, serta memberikan insentif bagi mereka yang patuh dan mau memberdayakan tenaga kerja lokal.
3. Pemerintah daerah harus terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan melalui pengembangan sektor potensial seperti pariwisata, industri pengolahan, pertanian dan perkebunan berbasis teknologi, serta perikanan. Pemerintah daerah juga perlu mengintensifkan program pelatihan kerja, pendampingan wirausaha, dan *link-and-match* antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
4. Pemerintah daerah harus terus melakukan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui edukasi keluarga berencana (KB) dan peningkatan

kesadaran masyarakat tentang kependudukan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperkuat layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih) seiring dengan peningkatan jumlah penduduk untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi antar masyarakat.

5. Pemerintah daerah harus memastikan pembangunan jalan diarahkan pada peningkatan konektivitas ekonomi, seperti menghubungkan pusat produksi (pertanian, UMKM) dengan pasar dan pelabuhan distribusi. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi kualitas, fungsi, dan persebaran jalan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya menambah panjang jalan, tetapi juga mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga penurunan tingkat kemiskinan dapat terjadi secara nyata.

### C. Keterbatasan Penelitian

Selama berlangsungnya studi ini, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh peneliti yang menjadi keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini, sehingga perlu menjadi perhatian bagi peneliti lain untuk meningkatkan kualitas dan menyempurnakan penelitian di masa mendatang. Beberapa keterbatasan tersebut diantaranya:

1. Saat melakukan penelitian ini peneliti tidak dapat melakukan Uji Hausman dan Uji *Langrange Multiplier* dikarenakan keterbatasan data *cross section* yang kurang dari jumlah variabel sehingga pemilihan model hanya sampai pada Uji *Chow*. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah agar tidak terjadi hal yang sama.

2. Penelitian lanjutan disarankan untuk memasukkan variabel bebas tambahan guna memperjelas dan memperdalam analisis. Dengan penambahan variabel baru, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan terkait berbagai faktor lain yang memengaruhi kemiskinan di Provinsi DIY, seperti kondisi geografis wilayah, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lainnya.

